



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS FATONI
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 262342

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.737.460.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/235 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.509.000.000
3. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 58.800.000
4. Bangunan Seluas 20 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 650 m2/400 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
6. Tanah Seluas 980 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
7. Tanah Seluas 214 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 52.430.000
8. Tanah Seluas 254 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 62.230.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **61.150.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 53.000.000



2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 4.200.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.950.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 200.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.679.488.440

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 9.678.798.440

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.678.798.440

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.